

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah terutama minyak bumi, gas alam, pertambangan, mineral, hutan, kekayaan laut dan sebagainya. Potensi ini harusnya dapat lebih dikembangkan sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tentunya menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Selain Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama maupun sejarah. Kedua potensi tersebut menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk menuju negara yang maju dan mandiri. Pada kenyataannya, kekayaan alam yang dimiliki masih belum mampu untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup (Rohim, 2013:2).

Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun Indonesia agar lebih maju serta memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan melalui pemberdayaan, sehingga masyarakat lokal memiliki kesadaran untuk menggali potensi dan bergerak membangun daerahnya masing-masing.

Setiap desa pasti memiliki potensi maupun peluang yang terdapat di tempat mereka, tetapi tergantung bagaimana pemerintah desa dalam mengambil langkah untuk bisa mandiri dan mampu menciptakan suatu peluang bagi masyarakatnya.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah desa atas dasar peraturan pemerintah dalam mengembangkan desa yaitu melalui Program Desa Mandiri. Pengembangan desa melalui pembangunan Desa Mandiri ini merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut terlibat didalamnya. Dengan terbentuknya Desa Mandiri ini diharapkan pemerintah desa mampu mengelola potensi yang ada di tempat mereka dan bisa memberikan suatu bentuk kesejahteraan bagi masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dianggap memberikan suatu nilai bagi kehidupan mereka kedepannya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu yang telah melakukan beberapa upaya yang nyata guna memberikan peluang yang besar dalam pengembangan desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap Pemerintah Desa untuk menyusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang mengacu kepada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bangka Barat (RENSTRADA) tahun 2005-2010 serta Rencana Umum Pengembangan Otonomi Desa (RUPOD) yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang desa serta telah menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan desa sehingga

menjadi desa yang maju dan kuat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ketap merupakan suatu dokumen perencanaan yang substansinya terdiri dari visi, misi dan arah pembangunan desa yang merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah desa yang menyebutkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga atau masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu mengenai pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Serta memberikan limpahan wewenang yang lebih luas kepada desa dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan secara otonom.

Keberhasilan program pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan partisipatif (Suhendra, 2006). Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan masyarakat untuk

mengontrol atau menentukan pengambilan keputusan dalam berbagai tahap kegiatan tersebut untuk meyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi.

Program Desa Mandiri merupakan salah satu program unggulan dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat dengan mengembangkan perekonomian desa sesuai potensi yang dimiliki desa masing-masing. Program ini adalah salah satu kebijakan yang diupayakan oleh Bupati Bangka Barat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Program Desa Mandiri. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan kondisi, potensi dan proyeksi kebutuhan desa dalam kurung waktu 5 tahun. Tujuannya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat yang melibatkan unsur masyarakat sebagai komponen utama. Adapun kriteria Desa Mandiri yaitu desa mampu memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan adat istiadat, lokasi, wilayah dan budaya namun tetap dalam koridor aturan NKRI.

Desa mendukung pendidikan yang baik bagi generasi muda, setiap warga menyadari pentingnya menjaga ketentraman dan keamanan bersama, terdapat sarana dan sistem yang muda bagi masyarakat untuk berinovasi, dan warga menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu daerah yang mendapat perhatian pemerintah terkait kebijakan ini adalah Desa Ketap yang terletak di Kecamatan Jebus. Upaya pembangunan Desa Mandiri ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif

peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Masyarakat desa selama ini tergantung pada lahan sebagai sarana pertambangan, pada dasarnya telah membentuk suatu kebudayaan yang tercermin dalam berbagai bentuk tingkah laku individu, lembaga-lembaga sosial serta nilai-nilai yang berkembang. Akan tetapi setelah adanya pergeseran, mulai dapat wadah-wadah baru yang berfungsi untuk beraktivitas. Kehadiran Desa Mandiri telah membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Semenjak adanya Desa Mandiri masyarakat mengalami perubahan pada pola hidup terutama perilaku secara individual nampak dikalangan masyarakat yang beralih pekerjaan dari sektor pertambangan timah ke sektor perkebunan.

Menurut Rokandi (12 November 2015) selaku ketua dari Desa Mandiri pada Desa Ketap mengungkapkan bahwa pendapatan masyarakat desa itu minimal 2,5 Juta perbulan setiap KK tetapi kenyataannya sekarang pendapatan masyarakat desa menurun 30-40% perbulannya. Hal ini disebabkan karena harga jual hasil perkebunan rendah seperti karet dari harga Rp. 10.000- Rp.12.000 menjadi Rp. 4.500-5000, harga sawit dari harga Rp. 1.200 menjadi Rp. 900 hanya lada yang harganya tinggi berkisar antara Rp. 150.000- Rp.170.000, sedangkan tanaman teh kurang diminati masyarakat karena mengelolanya susah terus pemasarannya sulit karena tidak adanya investor teh ini mempengaruhi terhadap pendapatan masyarakat. Dalam hal ini berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Mandiri seperti dari kawasan hutan atau lahan untuk

mengembangkan perkebunan, kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten terkait dengan penyuluhan dan dana untuk desa.

Dalam hal ini desa mengalami kemajuan dari segi sarana dan prasarana seperti mendapatkan PLN gratis, mendapatkan satu mesin penggilingan teh, penambahan PAUD, rehab jalan dan siring RT 06, peningkatan bahu jalan RT 03, siring jalan SDN 2 Ketap, siring jalan utama, bantuan bibit teh, rehab jembatan Dusun Tayu.

Melihat situasi ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan meteliti “Program Desa Mandiri dan implikasinya terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Program Desa Mandiri dan implikasinya terhadap perubahan sosial masyarakat di Desa Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrisikan Program Desa Mandiri dan implikasinya terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Ketap, Kecamatan Jebus , Kabupaten Bangka Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guna mensejahterahkan masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perubahan pola perilaku masyarakat terhadap Desa Mandiri sudah banyak dilakukan. Penelitian Wawan K. Tolingi yang berjudul “Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo” (2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya atau dikuasainya secara optimal.

Desain Penelitian adalah pendekatan survei dengan menggunakan data sekunder dan primer, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: analisis deskriptif, analisis kelembagaan, analisis *Comparative Performance Index* (CPI) dan analisis LFA (*Logical Framework Analysis*).

Hasil analisis penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo meliputi 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Identifikasi dampak program desa mapan yang menggunakan 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi serta penilaian terhadap dampak program desa mapan menunjukkan Desa Sukamaju berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mapan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mapan terhadap masyarakatnya. Sistem kelembagaan desa mandiri pangan di Desa Sukamaju, Desa Batu Keramat, dan Desa Dunggala melibatkan kegiatan lintas sektor yang dimulai dari Tim Pangan Desa, Kepala Desa, Camat, Pokja Desa Mapan, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan.

Dampak program desa mandiri pangan di Provinsi Gorontalo dilihat dari manfaatnya dapat meningkatkan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan hasil (*outcomes*) yaitu tersedianya modal usaha, sarana dan prasarana semakin lengkap dan berkurangnya masyarakat miskin, dan *output* (keluaran) yang diperoleh adalah strategi pengembangan usaha yang terencana dan peningkatan produktivitas. Serta



kegiatan (*activities*) yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang intensif, menjalin kerjasama dengan Universitas, Lembaga Keuangan (Bank) dan swasta.

Penelitian berikutnya diambil dari penelitian Khairun Umasa Siregar yang berjudul ‘‘Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat (Studi Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan penerimaan program Demapan, mengetahui perkembangan program Demapan dan mengetahui dampak program Demapan pada tingkat pendapatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan metode wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner dan studi literatur. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden dengan harapan agar peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai karakteristik responden, karakteristik usaha, pendapatan usaha serta tanggapan respon terhadap program Demapan.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan pelaksanaan program Demapan, mekanisme proses penyaluran Demapan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, juga dikumpulkan data-data penunjang seperti gambaran umum lembaga di daerah.

Hasil penelitian ini adalah Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa/kelurahan dimana memiliki kepala keluarga (KK) miskin >30% dan menerima bantuan dana abadi desa sebesar Rp 100.000.000 yang diberikan

kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman berbunga rendah melalui kelompok-kelompok afinitas. Perkembangan program Demapan di daerah penelitian dari tahun 2008-sekarang telah mencapai 4 tahap. Dari tahap persiapan (2008) terdapat 3 kelompok sampai dengan tahap kemandirian (sekarang) telah terbentuk 5 kelompok afinitas. Jumlah anggota meningkat yang semula berjumlah 50 orang dan telah terdapat 194 orang anggota kelompok afinitas. Program Desa Mandiri Pangan telah memberikan dampak positif terhadap tingkat pendapatan masyarakat miskin dengan rata-rata kenaikan pendapatan sebesar 52% di Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Penelitian berikutnya diambil dari penelitian Valeriana Darwis yang berjudul ‘‘Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan’’ (2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Data cross section diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden terpilih yang dipandu dengan kuesioner. Data yang terkeumpul dianalisis kedalam bentuk tabulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Eksistensi Desa Mapan berdampak positif terhadap kasus kekurangan pangan pokok yang secara agregat menurun dari 39,77% menjadi 29,02%. Akselerasi penurunan kasus kekurangan pangan pokok ini terjadi lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa. Perbaikan ketersediaan pangan pokok terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan karena diversifikasi sumber pendapatan yang meningkat. Disamping itu indikator rawan pangan lainnya, yaitu berat badan balita dibawah berat standar secara agregat juga

mengalami penurunan signifikan dari 2,35% menjadi 1,03%. Desa Mapan berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Secara agregat, rumah tangga keluarga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin” menurun secara signifikan. Akselerasi penurunan terjadi lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa. Di lain pihak, rumah tangga dengan katagori “kurang sejahtera” meningkat dari 25,74% menjadi 42,44%, dan katagori “sejahtera” meningkat dari 1,23% menjadi 10,33%. Di luar Jawa, katagori “sejahtera” meningkat dari 1,21% menjadi 7,88%, sementara itu rumah tangga dengan katagori “kurang sejahtera” meningkat signifikansi dari 21,88% menjadi 43,28%. Indeks kemiskinan rumah tangga miskin ditentukan oleh dua kelompok indikator yaitu: ”kondisi rumah tinggal” dan “kondisi sosial ekonomi” keluarga.

Desa Mapan berdampak positif terhadap perbaikan tempat tinggal RTM yang diindikasikan oleh perluasan/perbaikan lantai dan tembok rumah serta perbaikan sanitasi dan lingkungan. Secara spasial, karena tidak terdapat perbedaan percepatan dampak, pada tahun 2012 kondisi perumahan di Jawa nampak lebih baik dibandingkan di luar Jawa. Desa Mapan juga berdampak positif terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi RTM dipedesaan. Perbaikan sosial ekonomi RTM diindikasikan oleh peningkatan frekuensi makan, konsumsi pangan hewan, perbaikan akses ekonomi sandang, dan akses pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbaikan ekonomi keluarga yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan tabungan keluarga miskin. Disadari bahwa keberlanjutan atau sustainabilitas dampak jangka panjang Desa Mapan ini akan

sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir RTM. Pembentukan dan pemberdayaan RTM dalam kelembagaan KA ternyata berdampak positif terhadap kepercayaan diri, aspek gender, dan kewirausahaan yang selanjutnya berkontribusi positif terhadap pemanfaatan kapital (bantuan pemodalangan/tabungan/pendapatan) dalam adopsi teknologi terkait dengan pengembangan usaha produktif keluarga. Dampak akselerasi perbaikan pola pikir ini nampak lebih besar di luar Jawa dibandingkan di Jawa.

#### **F. Kerangka Teoretis**

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur masyarakat yang sejajar dengan perubahan kebudayaan dan fungsi suatu sistem sosial. Diantara kebudayaan dan struktur masyarakat terdapat antar hubungan fungsional, yang satu menganjurkan yang lain dan sebaliknya serta secara keseluruhan meningkatkan kepada suatu sistem yang mulai pada suatu atau beberapa tempat dan bergandengan dengan reaksi lain yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya.

Menurut Moore dalam Soelaiman (Martono, 2011:4) perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial. Yang dimaksud struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Perubahan sosial mencakup semua aspek kehidupan sosial, karena seluruh aspek kehidupan sosial itu terus menerus berubah, hanya tingkat perubahannya yang berbeda.

Perubahan sosial terkadang hanya terjadi pada sebagian ruang lingkup, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Namun,

perubahan mungkin juga mencakup keseluruhan aspek sistem, dan menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan sistem secara mendasar berbeda dari sistem yang lama (Martono, 2011:4). Sehingga tidak ada manusia yang tidak mengalami suatu perubahan sosial baik itu perubahan besar maupun kecil. Perubahan yang besar yaitu perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat sedangkan perubahan yang kecil yaitu perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat.

Menurut Soelaiman (Martono, 2011:4) Himes dan Moore mengemukakan tiga dimensi perubahan sosial :

#### 1. Dimensi Struktural

Perubahan sosial pada dimensi struktural mengacu kepada perubahan dalam bentuk struktur masyarakat menyangkut perubahan peran. Peran yang dimaksud serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran yang dijalankan oleh aparat desa untuk mensejahterahkan masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan dalam struktur juga menyangkut munculnya peran baru, muncul peranan baru yaitu adanya permasalahan atau program yang terjadi di masyarakat sehingga adanya peranan yang baru dalam menjalankan tugas, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial yaitu menyangkut kadar peranan yang dilakukan juga terkait aspek perilaku dan kekuasaan. Perubahan penting dari struktur sosial yaitu pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang

terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam lembaga sosial yaitu dengan berbagai munculnya lembaga sosial yang baru terkait program yang dijalankan untuk masyarakat.

## 2. Dimensi Kultural

Perubahan sosial dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan yang sudah lama ada dalam masyarakat sehingga ini menjadi kebiasaan tersendiri bagi masyarakat namun semakin adanya perubahan zaman maka kebudayaan dalam masyarakat pun menjadi mengalami suatu pergeseran, seperti adanya penemuan dalam berpikir (ilmu pengetahuan) sehingga kebudayaan yang sudah ada mengalami modifikasi yang lebih praktis. Namun kebudayaan yang telah terjadinya pergeseran juga tidak terlepas dari kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berfikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Difusi adalah suatu proses menyebarnya unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lainnya atau dari satu masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain sehingga memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur-unsur budaya lain sehingga memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut. Pembaharuan hasil teknologi juga dapat suatu perubahan dalam

masyarakat, dengan teknologi yang lebih canggih membuat masyarakat melakukan sesuatu dengan cara yang lebih mudah dan cepat.

### 3. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial dalam dimensi interaksional mengacu kepada hubungan sosial dalam masyarakat yang berkenaan dengan perubahan dalam frekuensi, jarak sosial, saluran, aturan-aturan atau pola-pola dan bentuk hubungan. Perkembangan teknologi yang telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka. Semua kebutuhan untuk berinteraksi dapat dipenuhi dengan memanfaatkan teknologi.

Perubahan dalam jarak sosial yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeserkan fungsi “tatap muka” dalam proses interaksi. Individu tidak harus bertatap muka untuk berkomunikasi dan interaksi secara langsung. Bahkan kedua individu berada di tempat yang sangat jauh, mereka tetap berkomunikasi meskipun dalam jarak yang sangat jauh. Mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak yang bersifat serba online, menyebabkan individu tidak banyak membutuhkan orang lain dalam proses pengiriman informasi.

Perubahan dalam bentuk interaksi, yaitu interaksi antara individu tidak sekaku masa lalu ketika berinteraksi harus dilakukan secara bertatap muka, di era sekarang interaksi dilakukan kapan saja melalui kecanggihan teknologi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk bertemu dalam menyampaikan

informasi karena kecanggihan teknologi sekarang ini membuat komunikasi berjalan dengan mudah walaupun jarak antar individu sangat jauh.

## **G. Alur Pikir**

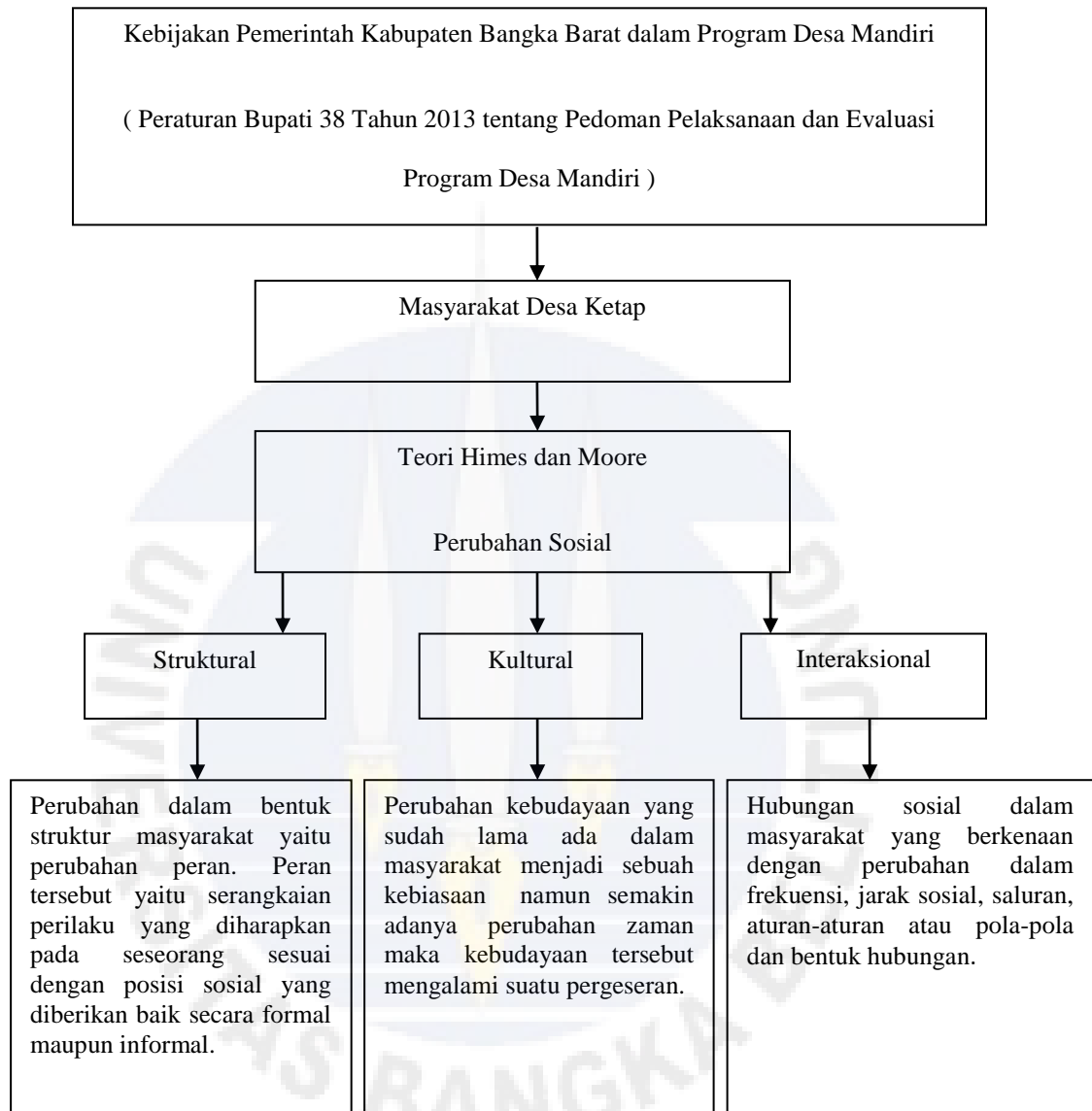
Dalam suatu penelitian desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum turun ke lapangan. Desain penelitian atau yang biasa juga disebut elit lokal dengan alur pikir. Gambar

### **1. Alur Pikir Penelitian**





## Alur Pikir Penelitian



Kerangka berpikir ini diawali dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melakukan beberapa upaya guna memberikan peluang besar dalam pengembangan desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa melalui Program Desa Mandiri. Program Desa Mandiri ini adalah salah satu upaya percepatan pembangunan di Bangka Barat. Desa Ketap merupakan salah satu desa yang melakukan Program Desa Mandiri. Usaha yang dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru pasca timah mengembangkan perekonomian desa sesuai potensi yang ada di desa tersebut. Tujuan dari Program Desa Mandiri ini yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat yang melibatkan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu penting untuk mengkaji tentang perubahan sosial masyarakat pedesaan karena program Desa Mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial. Dalam perubahan sosial terdapat tiga dimensi yaitu struktural, kultural, dan interaksional.